

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Bayi Mendapat Imunisasi Campak			100%	100%	100%	100%	100%					
		C. STATUS GIZI												
		Persentase BBLR yg ditangani			100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Balita Gizi Baik	Cakupan balita gizi buruk dapat perawatan		80%	80%	80%	80%	80%					
		Persentase Balita Gizi Buruk			< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%					
		Persentase Ibu Hamil mendapat Fe			74%	78%	81%	85%	89%					
		Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif			67%	70%	75%	80%	82%					
		Persentase Balita Mendapat Kapsul Vitamin A			78%	80%	83%	85%	87%					
II.	MENINGKATKAN LINGKUNGAN SEHAT													
		Persentase Rumah Sehat			75%	79%	81%	83%	85%					
		Persentase TTU Sehat			75%	79%	81%	83%	85%					
		Persentase KK Memiliki SAB			71%	72%	73%	74%	75%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase KK Memiliki Jamban Sehat			65%	67%	70%	73%	75%					
		Persentase KK Mengelola Sampah dengan Baik			65%	67%	70%	73%	75%					
		Persentase Keluarga Mengelola Air Limbah dengan Aman			65%	67%	70%	73%	75%					
III.	MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT													
		Persentase Desa yang Memiliki UKBM (Posyandu)			100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Penduduk Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan			80%	80%	80%	80%	80%					
		Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS			65%	65%	65%	65%	65%					
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri			40%	40%	40%	40%	40%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IV.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN													
	A. PELAYANAN KESEHATAN													
	Ratio Puskesmas terhadap Penduduk				8/100.000 pddk	8/100.000 pddk	8/100.000 pddk	8/100.000 pddk	8/100.000 pddk					
	Ratio Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk				5/ 10.000 pddk	5/ 10.000 pddk	5/ 10.000 pddk	5/ 10.000 pddk	5/ 10.000 pddk					
	Persentase Murid SD/ MI Mendapat Pemeriksaan Gigi & Mulut				80%	80%	80%	85%	85%					
	Persentase Keluarga Miskin Mendapat Pelayanan Kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin		80%	80%	80%	80%	80%					
	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan		Cakupan pertolongan persalinan dg nakes		92%	92%	92%	92%	92%					
	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K-4		Cakupan Komplikasi kebidanan yg ditangani		95%	95%	95%	95%	95%					
	Persentase Peserta KB Aktif				70%	70%	70%	70%	70%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		B.MANAJEMEN KESEHATAN												
		Ratio Dokter Spesialis			6/100.000 pddk	6/100.000 pddk	6/100.000 pddk	6/100.000 pddk	6/100.000 pddk					
		Ratio Dokter Umum			40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk					
		Ratio Dokter Gigi			11/100.000 pddk	11/100.000 pddk	11/100.000 pddk	11/100.000 pddk	11/100.000 pddk					
		Ratio Perawat			117,5/100.000 pddk	117,5/100.000 pddk	117,5/100.000 pddk	117,5/100.000 pddk	117,5/100.000 pddk					
		Ratio Bidan			100/100.000 pddk	100/100.000 pddk	100/100.000 pddk	100/100.000 pddk	100/100.000 pddk					
		Ratio Apoteker			10/100.000 pddk	10/100.000 pddk	10/100.000 pddk	10/100.000 pddk	10/100.000 pddk					
		Ratio Ahli Gizi			22/100.000 pddk	22/100.000 pddk	22/100.000 pddk	22/100.000 pddk	22/100.000 pddk					
		Ratio Ahli Sanitasi			40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk					
		Ratio Ahli Kesehatan Masyarakat			40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk	40/100.000 pddk					
		Persentase Anggaran Kesehatan Daerah Terhadap APBD			15%	15%	15%	15%	15%					
		Persentase Persediaan Obat Puskesmas Terhadap Kebutuhan			90%	90%	90%	90%	90%					
		Persentase Kabupaten Membuat Profil Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Kabupaten Mempunyai Dokumen SIK			100%	100%	100%	100%	100%					

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	71.918.718.491,-	130.995.765.378	95.606.668.303	98.010.028.204	109.008.782.635	55.943.154.509	95.319.191.678	77.745.888.618	72.033.687.298	84.741.515.356	77.78	72.76	81.31	73.49	77.73	0.17	0.16
Belanja Tidak Langsung	30.319.445.405,-	57.490.787.744	40.259.400.356	44.146.340.828	50.344.469.783	28.563.614.784	49.032.338.616	38.435.975.849	43.137.391.507	43.574.446.278	94.20	85.28	95.47	97.71	86.55	0.21	0.16
TOTAL	102.238.163.896	188.486.553.122	135.866.068.659	142.156.369.032	159.353.252.418	84.506.769.293	144.351.530.294	116.181.864.467	115.171.078.805	128.315.961.634	85.99	79.02	88.39	85.6	82.14	0.38	0.32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

1. Peluang

- a. Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah; Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- b. Peraturan Pemerintah NO.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Kesehatan No. 951/Menkes/SK/V/2000 tentang pelaksanaan Surveillance Kasus Gizi Buruk; Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pengembangan Desa Siaga; Keputusan Menteri Kesehatan No. 1228 Tahun 2007 tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai Sub Regional Penanggulangan Krisis; Keputusan Menteri Kesehatan No. 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS); Keputusan Menteri Kesehatan No 791/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Essensial Nasional 2008;
- e. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
- f. Pergub No. 41 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Peraturan Gubernur No. 440-14-2010 tentang Pembentukan Komite Uji Kompetensi Bidan

- g. Adanya kesepakatan MDG's 2015, point 4 (Penurunan Angka Kematian Bayi 2/3 dari tahun 1990) dan 5 (Penurunan Angka Kematian Ibu $\frac{3}{4}$ dari tahun 1990) diikuti dengan peran organisasi Profesi dan peran swasta di dalam mendukung program untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) diikuti dengan Komitmen dalam penyediaan sarana kesehatan yang mampu menanggulangi kegawadaruratan permasalahan Ibu dan Neonatal, MDG's 2015 point 6 (Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular seperti Malaria, HIV/AIDS dan TB), dan point 7 (Penyediaan Air Minum dan Fasilitas Sanitasi Dasar);
- h. Adanya kebijakan Bidan PTT pada setiap Poskesdes dan pada daerah terpencil;
- i. Adanya Komitmen Pemerintah Faerah dalam mendukung peningkatan program kesehatan;
- j. Tersedianya Sumberdaya Kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tertier;
- k. Tersedianya Dukungan Dana Kesehatan dari Sumber APBD, APBN dan PHLN dalam meningkatkan Program Kesehatan di Sumatera Barat;
- l. Tersedianya Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi (Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Kesehatan);
- m. Adanya peran serta lintas sector terkait, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu/Poskesri/Poskeskel/Poskestren/Polinder dll);

2. Tantangan

- a. Distribusi tenaga kesehatan strategis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, tenaga kesehatan lainnya) yang tidak merata;
- b. Masih terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;
- c. Status kepegawaian tenaga kesehatan masih PTT, sehingga motivasi dan dedikasi belum optimal;
- d. Lemahnya upaya pembinaan dan apresiasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;

- e. Adanya kompetisi pasar bebas;
- f. Sumbar sebagai daerah Rawah Bencana;
- g. Adanya dampak terhadap Perubahan Iklim;
- h. Terjadinya transisi Epidemiologi dan demografi yang menyebabkan pola penyakit berubah dari penyakit infeksi ke penyakit generative yang berdampak pada beban ganda;
- i. Belum seluruhnya masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan Kabupaten Pasaman didapatkan dari hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Secara nasional Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan terdapat 5 kasus pada tahun 2016, tidak terjadi peningkatan pada tahun 2015 yang juga sebanyak 5 kasus pada tahun 2015 (SDKI,2016). Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 58 kasus pada tahun 2015 menjadi 33 kasus pada tahun 2016. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun 15% pada tahun 2016 menjadi 10.2% pada tahun 2015. Sejalan dengan itu Umur Harapan Hidup meningkat dari 62 tahun menjadi 63,2 tahun.

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian seperti cakupan rawat jalan sudah mencapai 72,62% pada tahun 2015. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 77,4% dan cakupan pelayanan antenatal (K4) sebanyak 79,42% . Cakupan kunjungan neonatus menurun dari 98% pada tahun 2015 menjadi 93,39% pada tahun 2016. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas mencapai target yaitu sebesar 79,58% dan sebanyak 107 Jorong (68.50%) di Kabupaten Pasaman telah menjadi Jorong Siaga. Namun perhatian perlu diberikan kepada pengembangan Jorong Siaga karena belum semua Jorong memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), masih terbatasnya jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan PONEC dan perlunya peningkatan mobilisasi ibu hamil untuk bersalin pada tenaga kesehatan dan upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Purnama dan Mandiri.

2. Upaya Kesehatan Perorangan

Upaya kesehatan perorangan mengalami peningkatan dan beberapa indikator telah mencapai target, bahkan melebihi target seperti peningkatan jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat meningkat dan mencapai 90%. Jumlah rumah sakit yang

melaksanakan PONEK meningkat dari Rumah Sakit Belum PONEK menjadi rumah sakit PONEK.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Pasaman terutama TB, Malaria, DBD dan Diare. Cakupan program imunisasi berdasarkan laporan rutin dari Puskesmas secara umum menunjukkan peningkatan. Cakupan imunisasi pada tahun 2016 adalah BCG 82,81%, DPT- HB3 80,75%, HB(0-7hari) 88%, Polio4 79% dan Campak 100%. Meski telah berjalan baik, program imuniasi belum optimal, karena cakupan saat ini belum merata yang digambarkan melalui persentase desa/jorong yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2016 mencapai 76,05%. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan pengendaliannya untuk masa yang akan datang. Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan meningkatnya outreach dan keterbukaan masyarakat terhadap penyakit ini. Case Detection Rate (CDR) tuber kulosis paru menurun menjadi 30.9% pada tahun 2016, untuk itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberculosi paru dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di tingkat pelayanan primer harus diperhatikan. Untuk malaria, daerah endemis semakin meluas dan ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama sektor terkait dengan man made breeding places. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih tinggi, yaitu sebesar 49 per 100.000 penduduk, walaupun demikian angka kematian akibat DBD relatif kecil. Untuk itu perlu perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri oleh masyarakat dengan penerapan 3M Plus (menguras,menutup,mengubur) dan juga didorong oleh upaya promotif. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada penyelenggaraan system surveilans dan kewaspadaan dini yang kurang mendapat perhatian pada penganggarannya. Untuk penyakit tidak menular ,berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab

kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler (hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.

4. Perbaikan Gizi Masyarakat

Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan gizi masyarakat antara lain pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 6-59 bulan sebesar 84% melampaui target 80% dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil telah mencapai 89% dari target 80%. Hasil Riskesdas menunjukkan terjadinya perbaikan status gizi anak balita, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 10.70% yang terdiri dari 10.40% gizi kurang dan 0.30% gizi buruk. Keadaan gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita perlu terus ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir rendah (BBLR) sebesar 11.5% dan tingginya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama (kronis) yaitu 36.8% (Riskesdas, 2013). Disparitas status gizi juga cukup lebar antar wilayah dan antar tingkat social ekonomi. Kedepan perbaikan gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang.

5. Kebijakan Penganggaran

Penganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Dana bantuan untuk Puskesmas sebaiknya juga mulai direncanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan Kabupaten/Kota dan besaran masalah masing-masing daerah. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat terdapat Kecamatan dengan masalah kesehatan sangat besar, memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan sudah mencapai target 15% seperti tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

6. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat memerlukan penguatan dan untuk informasi evidence planning tidak tersedia. Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas masih harus

terus dikembangkan di Kabupaten Pasaman meliputi pengembangan jaringan, input, dan entry point di daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi.

7. Sumber Daya Kesehatan

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk sudah memenuhi target. Pada tahun 2016 rasio tenaga kesehatan, seperti untuk dokter spesialis 14,30 per 100.000 penduduk (target 9 per 100.000 penduduk), dokter umum sebesar 29 per 100.000 penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi sebesar 3,30 per 100.000 penduduk (target 11 per 100.000 penduduk), perawat sebesar 70,01 per 100.000 penduduk (target 158 per 100.000 penduduk) dan Bidan sebesar 113,27 per 100.000 penduduk (target 75 per 100.000 penduduk).

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP Nomor 38 tahun 2000 dan PP Nomor 41 tahun 2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan system pengembangan karier.

8. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 69,74% dari target 95%, anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik sebesar 14,47% dengan target setara dengan \$2 US perkapita. Persepsian Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas sudah sebesar 90% namun di RSUD sebesar 66%. Dalam pengadaan obat sering terkendala system pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya asymmetric information dan praktek pemasaran yang kurang baik dan sekitar 30% obat resep dijual langsung oleh dokter, bidan atau perawat.

9. Kebijakan dan Manajemen

Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran. Capaian program yang menggembarakan diantaranya penduduk miskin yang menjadi Peserta jaminan kesehatan dan terlayani sudah 100%, tertanggulangnya masalah kesehatan akibat bencana secara cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas Kesehatan kabupaten Pasaman sudah dilakukan secara efektif, utamanya melalui media massa baik cetak maupun elektronik namun perlu penguatan untuk advokasi.

Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis manajerial maupun teknis seperti Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkesda).

Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan pada peningkatan kesetaraan gender (genderequity) dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi, manfaat dan control antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam pembangunan kesehatan. Diharapkan pada akhir pembangunan 5 tahun kedepan (2021) terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pasaman.

10. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan capaian, seperti rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat menjadi 48.66%. Indikator lainnya seperti Jorong Siaga sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 207 kejurongan se-Kabupaten Pasaman, namun kita harus memberikan perhatian pada perilaku merokok yang semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok, selain itu pemberian ASI Eksklusif yang menurun disebabkan baik oleh

perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan.

11. Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 73,23% belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 58,3% menjadi 60,33% dari target 85% pada tahun 2010, dan peningkatan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 78,5% belum mencapai target 85% pada tahun 2010. Selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasaman selama kurun waktu tahun 2016-2021 sudah dapat ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran, namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya. Pembangunan kesehatan dengan fokus wilayah diharapkan memperoleh perhatian, terdapat daerah-daerah di Kabupaten Pasaman dengan capaian derajat kesehatan yang sangat rendah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah atau terendah di antara Kecamatan lainnya. Daerah seperti ini memerlukan pendekatan penanggulangan yang sesuai.

3.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah

Isi RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat”. Visi ini diwujudkan dalam enam misi yaitu:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan peran lembaga adat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur

5. Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan visi misi tersebut, bentuk dukungan langsung Dinas Kesehatan dapat dilihat pada sasaran 2 misi 2 RPJMD “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, maka sasaran ini akan dicapai melalui pencapaian Indikator SPM Kesehatan yang terpenuhi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata

kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

- 1) *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*)
- 2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
- 3) Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*costcontainment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksidalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus

melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Dengan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 telah selaras dan sejalan, dimana tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta strategi pembangunan kesehatan mempunyai relevansi sesuai yang diharapkan.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Barat “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”, dengan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2019-2024. Renstra ini diselaraskan dengan perkembangan aktual bidang kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan bertujuan berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat Sumatera Barat. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

Dokumen ini juga menjadi acuan untuk pengembangan rumah sakit provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra memperhatikan perkembangan isu aktual dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun daerah, yang meliputi :

1. Adanya kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 1 mengamanakah bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan dapat dicapai melalui kegiatan kesehatan lingkungan, sesuai PP 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan yang mendefenisikan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit yang ada gangguan kesehatan dari factor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik dari aspek fisik, klinis, dan biologi.

Kegiatan puskesmas dapat menimbulkan dampak positif maupun negative terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, dampak negative yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan puskesmas yaitu pencemaran air, udara, dan limbah B3 medis. Sedangkan dampak positif dengan adanya puskesmas adalah penyerapan tenaga kerja, pelayanan kesehatan, dan munculnya peluang berusaha bagi masyarakat yang berada disekitar. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dima kegiatan operasional gedung dengan luas lebih dari $\geq 5\text{Ha}$ dan luas bangunan $\geq 10.000\text{ m}^2$ wajin menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target MDG's tahun 2015 sebesar 93 per 100.000 kelahiran

hidup, diperlukan upaya yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB) masih jauh dari target MDG's sebesar 22 per 100.000 kelahiran hidup, kalau dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on the track walaupun diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap jorong, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah sakit melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jamkesda. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan terpencil.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk peningkatan akses tersebut Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Ratio (BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu. Selain itu system rujukan belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tidak efisien. Kebijakan sertapembinaan dan pengawasan belum mencakup klinik dan rumah sakit swasta serta dirasakan belum terkoordinasinya pelayanan kesehatan secara ke wilayahan.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDG's.

Disamping itu terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Akibat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang

selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.

Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terlambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya persentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan yang berakibat pada timbulnya kemiskinan

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di daerah terpencil dan tertinggal. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, disamping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasaman mengacu pada Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi ditingkat pimpinan.

Sistem Informasi Kesehatan menjadi lemah setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum

optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong Peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut "wawasan kesehatan" perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan daerah.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sector kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, SKP dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem daerah lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada di luar domain sektor kesehatan. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, di antaranya faktor social ekonomi yang menentukan situasi di mana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target daerah (RPJPD,RPJMD), target nasional dan target MDG's.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan

untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat member nilai tambah.

Dari analisis situasi dan kecederungan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu-isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
- b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
- g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- i. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- j. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan dan urban-rural masih terjadi, untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.
- k. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan melalui pendekatan komprehensif.
- l. Pemenuhan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan masih belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan tujuan Dinas Kesehatan adalah untuk mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Pasaman yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Pasaman adalah “Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik Dan Bermartabat” dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan keteaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Layanan Dasar
4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur
5. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Kerakyataan Berbasis Keunggulan Lokal
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mendukung RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi 2 tujuan 1 sasaran 1 yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator Usia Harapan Hidup. Sasaran 2 pada misi 2 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” menjadi tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Dinkes yaitu sasaran strategis 1 “Meningkatnya Pelayanan kesehatan masyarakat” dengan indikator Persentase indikator SPM Kesehatan yang terpenuhi dan sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan.

Keselarasan tujuan dan sasaran serta target Dinkes Kabupaten Pasaman selama lima tahun kedepan (2021-2026) dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	67.78	67.79	68.17	68.36	68.55
		Meningkatnya Pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Indikator SPM Kesehatan yang terpenuhi	Persen	50	60	70	80	90
	Mewujudkan birokrasi yang bersih & akuntabel		Predikat SAKIP Kabupaten	Predikat	B (64.85)	B (66.70)	BB (68.65)	BB (70.85)	BB (73.15)
		Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	BB	BB	A	A	A
			Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	Persen	77.94	78	80	82	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan

VISI Kabupaten Pasaman :			
“Terwujudnya Masyarakat Pasaman Lebih Baik Dan Bermartabat”			
MISI ke-2 :			
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat terkait dengan pembiayaan kesehatan secara aktif (pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin) 2. Peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan (FKTP) 3. Meningkatkan penanganan dan pelayanan serta intervensi kasus Balita Stunting 4. Meningkatkan kemampuan SDM tenaga kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama 6. Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta penanggulangan kasus covid-19

MISI Ke-6 :			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi yang bersih & akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
		Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan kualitas SPJ dan ketepatan verifikasi keuangan
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dalam bab ini disajikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renstra Dinkes Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Program dimaksud merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkes Kabupaten Pasaman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan subkegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinkes Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan, maka langkah operasionalnya dituangkan dalam program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan 37 sub kegiatan
 - b. kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah 17 sub kegiatan
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan sistim informasi kesehatan secara terintegrasi dengan 3 sub kegiatan
 - d. Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kls C dan D sebanyak 2 sub kegiatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan
 - b. Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat(UKBM) tingkat kab/kota satu sub kegiatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberian izin apotek toko obat ,toko alat kesehatan dan optikal,Usaha mikro obat tradisional (UMOT)dengan satu sub kegiatan
 - b. Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga dengan satu sub kegiatan
 - c. Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumahmakan/restoran dan depot air minum (DAM) dengan satu sub kegiatan
 - d. Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan postmarket pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga satu sub kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota dengan dua sub kegiatan
 - b. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota dengan satu sub kegiatan
 - c. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tekhnis SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Dan selanjutnya program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai disertai indikator dan pagu indikatif sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman

DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator SASARAN, PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						Usia Harapan Hidup	Tahun	67.78	67.78		67.97		68.17		68.36		68.56		68.56			
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat						Persentase Indikator SPM Kesehatan yang sudah terpenuhi	%	50.00	50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		90.00			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75.00	75.00	90,000,000,000	80.00	90,000,000,000	80.00	92,000,000,000	85.00	95,000,000,000	95.00	97,000,000,000	95.00	464,000,000,000		
1.02.02						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Faskes yang Sesuai Standar	%	100.00	100.00	11,100,000,000	100.00	11,100,000,000	100.00	11,100,000,000	100.00	11,100,000,000	100.00	11,100,000,000	100.00	55,500,000,000	
1.02.02.2.01						Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.02						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	35	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	175	1,000,000,000	
1.02.02.2.01.03						Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.05						Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	10	1,000,000,000	
1.02.02.2.01.06						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	10	1,000,000,000	
1.02.02.2.01.07						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.08						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	5	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.09						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	11	11	700,000,000	11	700,000,000	11	700,000,000	11	700,000,000	11	700,000,000	55	3,500,000,000	
1.02.02.2.01.10						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit	3	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	15	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.11						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	9	5,000,000,000	
1.02.02.2.01.12						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	5	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.13						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	7	7	500,000,000	9	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	64	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.14						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	unit	16	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	80	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.15						Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	30	30	2,000,000,000	30	2,000,000,000	30	2,000,000,000	30	2,000,000,000	30	2,000,000,000	150	10,000,000,000	
1.02.02.2.01.16						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	12	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	60	10,000,000,000	
1.02.02.2.01.17						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	3	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	15	2,500,000,000	
1.02.02.2.01.18						Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	3	3	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	15	1,300,000,000	
1.02.02.2.01.19						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	-	-	-	192	30,000,000	192	30,000,000	192	30,000,000	192	30,000,000	768	120,000,000	
1.02.02.2.01.20						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	-	-	-	89,192	20,000,000	89,192	20,000,000	89,192	20,000,000	89,192	20,000,000	356,768	80,000,000	
1.02.02.2.01.21						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100.00	100.00	73,300,000,000	100.00	73,300,000,000	100.00	75,300,000,000	100.00	78,300,000,000	100.00	80,300,000,000	100.00	380,500,000,000	
1.02.02.2.02						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,800	5,800	400,000,000	5,800	400,000,000	5,800	400,000,000	5,800	400,000,000	5,800	400,000,000	29,000	2,000,000,000	
1.02.02.2.02.01						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,190	5,190	1,600,000,000	5,190	1,600,000,000	5,190	1,600,000,000	5,190	1,600,000,000	5,190	1,600,000,000	25,950	8,000,000,000	
1.02.02.2.02.02						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,230	5,230	400,000,000	5,230	400,000,000	5,230	400,000,000	5,230	400,000,000	5,230	400,000,000	26,150	2,000,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator SASARAN, PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26,021	26,021	500,000,000	26,021	500,000,000	26,021	500,000,000	26,021	500,000,000	26,021	500,000,000	130,105	2,500,000,000		
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51,700	51,700	400,000,000	51,700	400,000,000	51,700	400,000,000	51,700	400,000,000	51,700	400,000,000	258,500	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	174,756	174,756	400,000,000	174,756	400,000,000	174,756	400,000,000	174,756	400,000,000	174,756	400,000,000	873,780	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20,000	20,000	300,000,000	20,000	300,000,000	20,000	300,000,000	20,000	300,000,000	20,000	300,000,000	100,000	1,500,000,000		
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	46,566	46,566	400,000,000	46,566	400,000,000	46,566	400,000,000	46,566	400,000,000	46,566	400,000,000	232,830	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	803	803	400,000,000	803	400,000,000	803	400,000,000	803	400,000,000	803	400,000,000	4,015	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	607	607	400,000,000	607	400,000,000	607	400,000,000	607	400,000,000	607	400,000,000	3,035	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4,922	4,922	400,000,000	4,922	400,000,000	4,922	400,000,000	4,922	400,000,000	4,922	400,000,000	24,610	2,000,000,000		
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	6,672	6,672	300,000,000	6,672	300,000,000	6,672	300,000,000	6,672	300,000,000	6,672	300,000,000	33,360	1,500,000,000		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	3	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	1,500,000,000		
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	7	750,000,000	7	750,000,000	7	750,000,000	7	750,000,000	7	750,000,000	35	3,750,000,000		
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	10	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	2	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	10	750,000,000		
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	4	3,000,000,000	4	3,000,000,000	4	3,000,000,000	4	3,000,000,000	4	3,000,000,000	20	15,000,000,000		
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	607	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	3,035	750,000,000		
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	607	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	607	150,000,000	3,035	750,000,000		
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	2	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	10	5,000,000,000		
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000		
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	18	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	90	1,500,000,000		
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	35,000,000,000	5	35,000,000,000	5	37,000,000,000	5	40,000,000,000	5	42,000,000,000	25	189,000,000,000		
		1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	59,405	59,405	200,000,000	59,405	200,000,000	59,405	200,000,000	59,405	200,000,000	59,405	200,000,000	297,025	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	4	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	20	750,000,000		
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000		
		1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	16	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	16	200,000,000	80	1,000,000,000		
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	3	3	8,000,000,000	3	8,000,000,000	3	8,000,000,000	3	8,000,000,000	3	8,000,000,000	15	40,000,000,000		
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	5	15,000,000,000	5	15,000,000,000	5	15,000,000,000	5	15,000,000,000	5	15,000,000,000	25	75,000,000,000		
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	20	1,750,000,000		
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	8	8	1,200,000,000	8	1,200,000,000	8	1,200,000,000	8	1,200,000,000	8	1,200,000,000	40	6,000,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator SASARAN, PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal (Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa))	Laporan	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	20	1,000,000,000			
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	3	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000			
		1.02.02.2.03	Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	%	100.00	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	2,250,000,000			
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000			
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000			
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000			
		1.02.02.2.04	penerbitan izin rumah sakit kis C dan D	Jumlah Izin RS yang Diterbitkan	RS	1	1	5,150,000,000	1	5,150,000,000	1	5,150,000,000	1	5,150,000,000	1	5,150,000,000	1	25,750,000,000			
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	8	8	5,000,000,000	8	5,000,000,000	8	5,000,000,000	8	5,000,000,000	8	5,000,000,000	40	25,000,000,000			
		1.02.02.2.04.04	Penyilapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyilapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000			
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang Berkompetensi	Orang	50	50	250,000,000	50	275,000,000	50	300,000,000	50	325,000,000	50	350,000,000	250	1,500,000,000			
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang Diberikan	Izin	50	50	100,000,000	50	110,000,000	50	120,000,000	50	130,000,000	50	140,000,000	250	600,000,000			
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000			
		1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Profil SDM Kesehatan	Dokumen	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	5	600,000,000			
		1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	5	270,000,000			
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	-	50	30,000,000	50	40,000,000	50	40,000,000	50	40,000,000	50	50,000,000	200	160,000,000			
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	-	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	4	170,000,000			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil SDM Kesehatan	Dokumen	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000			
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	50	50	50,000,000	50	55,000,000	50	60,000,000	50	65,000,000	50	70,000,000	250	300,000,000			
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase tersedianya sediaan farmasi alkes dan makmin di faskes	%	80.00	80.00	350,000,000	85.00	420,000,000	85.00	454,000,000	90.00	550,000,000	95.00	600,000,000	95.00	2,374,000,000			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin UMOT	Kelompok	15	15	100,000,000	20	115,000,000	25	120,000,000	30	150,000,000	30	165,000,000	120	650,000,000			
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	25	25	50,000,000	25	60,000,000	25	60,000,000	25	75,000,000	25	90,000,000	125	335,000,000			
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	45	45	50,000,000	50	55,000,000	57	60,000,000	60	75,000,000	65	75,000,000	277	315,000,000			
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Izin P-IRT	Izin	10	10	100,000,000	15	115,000,000	20	120,000,000	25	150,000,000	30	165,000,000	100	650,000,000			
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	30	30	100,000,000	30	115,000,000	30	120,000,000	30	150,000,000	30	165,000,000	150	650,000,000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator SASARAN, PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan	sertifikat	20	20	100,000,000	25	115,000,000	30	120,000,000	35	150,000,000	40	165,000,000	150	650,000,000			
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2	2	100,000,000	2	115,000,000	2	120,000,000	2	150,000,000	2	165,000,000	10	650,000,000			
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Kasus Makmin dan Kosmetik yang Ditindak Lanjuti	%	15.00	15.00	50,000,000	18.00	75,000,000	20.00	94,000,000	23.00	100,000,000	25.00	105,000,000	25.00	424,000,000			
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	50	50	50,000,000	50	75,000,000	50	94,000,000	50	100,000,000	50	105,000,000	250	424,000,000			
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	80.00	80.00	5,500,000,000	85.00	5,500,000,000	85.00	6,000,000,000	90.00	8,000,000,000	95.00	10,000,000,000	95.00	35,000,000,000			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Dokumen	4	4	100,000,000	4	50,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	20	480,000,000			
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4	4	100,000,000	4	50,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	20	480,000,000			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Dokumen	-	-	-	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	16	200,000,000			
		1.02.05.2.02.02	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	-	-	-	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	16	200,000,000			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UKBM Tingkat Kabupaten	Posyandu	434	434	5,400,000,000	434	5,400,000,000	434	5,850,000,000	434	7,840,000,000	434	9,830,000,000	2,170	34,320,000,000			
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	17	17	5,400,000,000	17	5,400,000,000	17	5,850,000,000	17	7,840,000,000	17	9,830,000,000	85	34,320,000,000			
			Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Prediket SAKIP Kabupaten																	
			Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Prediket SAKIP Dinas Kesehatan	Prediket	70.00	70.00		75.00		80.00		81.00		82.00		82.00				
				Persentase capaian realisasi fisik/keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	77.94	77.94		78.00		80.00		82.00		85.00		85.00				
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	%	100.00	100.00	51,460,000,000	100.00	52,500,000,000	100.00	52,650,000,000	100.00	52,800,000,000	100.00	53,000,000,000	100.00	262,410,000,000			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	7	7	30,000,000	7	30,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	35	195,000,000			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	10,000,000	3	10,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	15	80,000,000			
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	20,000,000	4	20,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	20	115,000,000			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	48,244,575,277	100.00	49,244,575,277	100.00	49,244,575,277	100.00	49,244,575,277	100.00	49,444,575,277	100.00	245,422,876,385			
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bule	633	633	47,815,075,277	633	48,815,075,277	633	48,815,075,277	633	48,815,075,277	633	49,015,075,277	3,165	243,275,376,385			
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	429,500,000	12	429,500,000	12	429,500,000	12	429,500,000	12	429,500,000	60	2,147,500,000			
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian	ASN	633	633	175,424,723	633	175,424,723	633	175,424,723	633	180,424,723	633	180,424,723	3,165	887,123,615			
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	150,424,723	2	150,424,723	2	150,424,723	2	150,424,723	2	150,424,723	10	752,123,615			
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	250	135,000,000			
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah	%	100.00	100.00	650,000,000	100.00	690,000,000	100.00	745,000,000	100.00	810,000,000	100.00	810,000,000	100.00	3,705,000,000			
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000			
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	85,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	5	425,000,000			
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator SASARAN, PROGRAM, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000		
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	5	250,000,000		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200	200,000,000	200	240,000,000	200	250,000,000	200	270,000,000	200	270,000,000	1,000	1,230,000,000		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	12	12	575,000,000	12	575,000,000	12	610,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	60	3,060,000,000		
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	3	50,000,000	3	50,000,000	3	60,000,000	3	70,000,000	3	70,000,000	15	300,000,000		
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000		
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	300,000,000		
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000		
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	75,000,000	3	75,000,000	3	80,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	15	410,000,000		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	6,500,000,000		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	60	1,000,000,000		
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	60	5,000,000,000		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	114	114	485,000,000	114	485,000,000	114	530,000,000	114	570,000,000	114	570,000,000	570	2,640,000,000		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	70	70	125,000,000	70	125,000,000	70	130,000,000	70	140,000,000	70	140,000,000	350	660,000,000		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	125,000,000	20	125,000,000	20	130,000,000	20	140,000,000	20	140,000,000	100	660,000,000		
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	60,000,000	10	60,000,000	10	70,000,000	10	80,000,000	10	80,000,000	50	350,000,000		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	50,000,000	10	50,000,000	10	60,000,000	10	70,000,000	10	70,000,000	50	300,000,000		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2	50,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	10	300,000,000		
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	75,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	10	370,000,000		
				JUMLAH				147,560,000,000		148,695,000,000		151,404,000,000		156,675,000,000		160,950,000,000		765,284,000,000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 2021-2026 mencakup indikator kinerja, indikator sasaran, indikator program (outcome), dan indikator kegiatan (output) berakumulasi untuk pencapaian indikator daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Pasaman 2021-2026. Indikator-indikator yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman selain mendasarkan pemikiran pada pencapaian indikator RPJMD juga memperhatikan tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Selanjutnya indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 2021-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman 2021-2026 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Indikator SPM Kesehatan yang terpenuhi	35	40	50	60	70	80	90	90
2	Nilai evaluasi SAKIP	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
3	Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	77,89	77,89	72,94	78	80	82	85	85

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2022-2026 berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman tahun 2022-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadi kenyataan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Kabupaten Pasaman yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Pasaman khususnya dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan. Demikianlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022-2026 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

Lubuk Sikaping, Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASAMAN**



DESRIZAL, SKM, M.Kes

NIP. 19630219 198610 1 001